

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DI PERBATASAN INDONESIA MALAYSIA**

ARTIKEL



Oleh:

ANDRA

NIM: 11144300054

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Andra, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta. Judul penelitian adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia di perbatasan Indonesia Malaysia (Studi Kasus Desa Labang Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Desa Labang Dalam Menjaga Keutuhan NKRI di Perbatasan, hal ini penting sekali untuk diteliti dan harus lebih di tekankan karena Wilayah Perbatasansangatrawan, untuk itu perlu adanya pemahaman kepada masyarakat agar keutuhan NKRI di perbatasan Terjaga keamanannya, terkhususnya masyarakat yang ada di perbatasan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, sedang kan objek penelitian adalah Desa Labang. Dipilihnya desa tersebut sebagai objek penelitian karena desa tersebut merupakan desa yang berada di garis perbatasan Kecamatan Lumbis ogong dengan Negara bagian Sabah-Malaysia. Pengumpulan data di lakukan dengan dokumen, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh disajikan dan di analisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Adapun temuan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, ternyata masyarakat desa labang sangat antusias dalam menjaga wilayah perbatasan. Penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga daerah perbatasan sangat kurang untuk mengawal dan menjaga daerah perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong, dan karena belum memenuhi kebutuhan masyarakat. *Kedua*, kurangnya Fasilitas yang membuat masyarakat perbatasan tidak mampu untuk menjaga. Terbatasnya alat-alat yang bias mendeteksi daerah perbatasan. *Ketiga*, Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat desa perbatasan sehingga hal ini membuat masyarakat perbatasan tidak sanggup untuk melibat kan diri untuk menjaga kedaulatan Negara. *Keempat*, keterisolasian wilayah sehingga sulit di jangkau oleh pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. *Kelima*, kurangnya perhatian pemerintah terhadap penduduk di daerah perbatasan sehingga berindikasi pada termarjinalnya dan tertinggalnya serta terbelakangnya masyarakat di daerah perbatasan karena faktor pendukung dari pemerintah Pusat dan Daerah kurang.

Kata Kunci : *Partisiapsi, Masyarakat, Menjaga NKRI, Daerah perbatasan*

ABSTRACT

Andra, Study Program of Pancasila and Citizenship Education Faculty of Teacher Training and Education Science PGRI University of Yogyakarta. The title of the research is society's participation in maintaining the unity of the Indonesia Republic in the boarder of Indonesia-Malaysia (the case study at Labang Village, sub district of Lumbis Ogong, district of Nunukan)

The objective of this research was to find out society's participation of Village of Labang in maintaining the unity of NKRI (Unitary State of the Indonesia Republic) in the boarder. It is very important to research and should strongly be emphasized more because the border area is vulnerable. Therefore, understanding is needed for the society so the unity of NKRI in border is maintained for its safety, especially for the society who is in the border.

This research was conducted in the Sub District of Lumbis Ogong, district of Nunukan, while the object of research was Village of Labang. The village was chosen as the research object because the village is on the border line between the Sub District of Lumbis Ogong and Malaysian State of Sabah. The data collection was conducted by documents, observations and interviews. The obtained data was presented and analyzed by the qualitative descriptive technique.

The findings in this research were; first, the society of Labang village was very enthusiastic in maintaining the border region. Providing of the facilities and infrastructure to maintain the border region was very less to guard and keep the border region in the Sub District of Lumbis Ogong, and it has not fulfilled the need of the society. Second, The facilities were lack, in which made the border society not able to maintain it. There were limited tools that can detect the border region. Third, it was the lack of government attention to the border village societies so it made them not able to involve themselves to maintain the sovereignty of the state. Fourth, the area was isolated so it was difficult to reach by government in carrying out the service to the society. Fifth, it was the lack of government attention to the population in the border region so it indicated the marginal, underdeveloped, and backward society in border region because of the lack of the supporting factors from the central and local government.

Keywords: Participation, Society, Maintaining NKRI, border region

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pola perkembangan wilayah sebelum tahun 1998 mengalami perubahan sejak perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut maka dikeluarkan PP No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru, penghapusan dan penggabungan daerah otonom. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diganti dengan PP No. 78 tahun 2007. Wilayah gugusan pulau-pulau terpencil tersebut secara ekonomis mempunyai potensi yang sangat kaya akan lahan yang cukup luas, sumber laut, sumber daya tambang, dan pariwisata. Padahal, jika berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau-pulau terpencil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial.

Kebijakan penataan wilayah (*teritorial reform*) pada hakekatnya merupakan salah satu elemen dari manajemen pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk menata wilayah administratif suatu daerah agar rentang kendali menjadi lebih efektif dan efisien. Idealnya, penataan wilayah ini dilakukan seiring sejalan dengan perkembangan suatu daerah, sehingga pertumbuhan dan kemajuan daerah tersebut tidak hanya tersentral namun dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah. Pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru biasanya menjadi awal bagi perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan ini sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, baik yang bersumber dari kekayaan alam, maupun yang berupa sumber-sumber daya lainnya, seperti kemajuan industri, pariwisata dan sebagainya.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah negara, karena perbatasan negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan daerah perbatasan merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional, dimana peran pemerintah pusat dalam

penentuan kebijakan daerah perbatasan sangat besar dan merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun karena letak kondisi geografis yang jangkauannya sangat jauh dari sentuhan pemerintah pusat dan seiring dengan bergulirnya otonomi daerah sehingga dalam penanganannya diterapkan kerangka yang menyeluruh.

Seiring dengan bergulirnya reformasi pemerintahan yang ditandai ditetapkannya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diganti dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, yang memberikan desentralisasi luas, maka perlu kiranya ditempuh langkah-langkah penanganan di daerah perbatasan di berbagai bidang pembangunan termasuk didalamnya adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat perbatasan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah guna mengoptimalkan sumberdaya setempat untuk menghindari ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat yang ada di daerah perbatasan. Perubahan orientasi pembangunan daerah perbatasan yang semula dianggap sebagai halaman belakang (*backyard*) menjadi halaman depan (*front yard*) bangsa atau yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, harus benar-benar diwujudkan.

Oleh karena itu maka sangat di butuhkan kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keutuhan Negara dan bentuk nasionalisme terhadap bangsa ini tentu masyarakat berpartisipasi dalam menjaga masalah di wilayah perbatasan seperti yang di lakukan oleh masyarakat Desa Labang dalam menjaga keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia yang langsung berbatasan dengan Negara Malaysia.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana Kontribusi dan partisipasi masyarakat desa labang dalam menjaga keutuhan negara republik Indonesia diperbatasan.Maka, dalam penelitian ini penulis mengangkat dan memilih judul :

“Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Diperbatasan Indonesia, Malaysia (Studi Kasus di Desa

Labang Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara)”.

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI diperbatasan di Desa Labang Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat menurut (*Ach. Wazir Ws., et al. 1999:29*) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Partisipasi masyarakat menurut (*Isbandi. 2007:27*). Adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

B. Konsep dan Lingkup partisipasi masyarakat

Konsep partisipasi diartikan dengan “keikutsertaan, keterlibatan, dan pembagian peran”. Kata ini banyak digunakan oleh masyarakat, akademisi, pemerintah, LSM, Jurnalis, politikus dan pelatih dengan maksud tujuan yang berbeda. Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas, maka disini akan diuraikan tentang konsep partisipasi.

Kalau dilihat istilahnya, maka partisipasi mengacu pada posisi pelaku sebagai part yang artinya bagian/ambil bagian atau partner yang berarti mitra. Pemahaman yang pertama yang mengkaitkan partisipasi dengan kata part menempatkan partisipasi pada posisi pelaku sekedar ambil bagian atau sekedar berperan serta dan lebih cenderung pada posisi pinggiran atau marjinal. Dengan demikian partisipasi lantas hanya pendekatan kata dari ikut serta atau peran

serta, yang pada proses terbentuknya tindakan tersebut tidak diawali adanya proses internal kesadaran yang menumbuhkan dorongan untuk berprakarsa atau berinisiatif atau mengawali suatu tindakan bersama.

C. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

D. Teori Negara dan Kedaulatan Negara

Menurut kamus umum bahasa Indonesia Negara adalah persekutuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badan pemerintah dengan teratur. Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalam arti luas yang merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama, sedangkan negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidup wajar dan berkembang terus.

Negara dan hukum lahir bersamaan dengan adanya negara itu sendiri, atau dengan kata lain jauh sebelum negara dan hukum disistematisasikan menjadi ilmu pengetahuan, negara sudah ada pada jaman purba (kuno). Keterlambatan lahirnya kajian atau ilmu tentang negara, disebabkan karena jaman dahulu negara dikuasai oleh seorang raja yang mempunyai kekuasaan mutlak (absolut), yang pada gilirannya akan memasung kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapat.

Setelah negara atau peradaban tersebut ada, sehubungan itu, maka pemikiran tentang negara dan hukum tersebut baru akan dijumpai disuatu Negara, dimana system ketatanegaraannya memberikan kemungkinan kepada Negaranya untuk secara bebas mengeluarkan pendapat secara kritis. (Suryo Sakti Hadiwijoyo 2009:1:2).

E. Hak dan Kewajiban Bagi Warga Negara

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara, warganegara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warganegara juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. (Pradigma Yogyakarta 2002:6:7).

Penyelenggara negara mempunyai peran aktif yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dengan berdasarkan kepada ke Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (UUD, RI 1945 Yogyakarta: Pustaka Zeedny, Maret 2010: hlm:93).

F. Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal yang harus kita tanggungi dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman.Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bagaimana agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Salah satu caranya adalah kita sebagai warga

negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia.

G. Daerah Perbatasan

Daerah Perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis perbatasan langsung dengan negara tetangga dan langsung berhadapan dengan negara lain. Wilayah yang dimaksud adalah bagian wilayah propinsi, kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara (atau wilayah negara tetangga). Konsep tentang daerah perbatasan dituangkan dalam buku Pemufakatan Dasar Lintas Batas antara Republik Indonesia dan Malaysia (1979), yang menyatakan: Daerah perbatasan meliputi seluruh daerah sepanjang perbatasan dari pantai barat Kalimantan Barat sampai Pulau Sebatik (Kalimantan Utara). Daerah perbatasan adalah suatu jalur yang lebarnya oleh masing-masing pihak, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) mil, maksimal seluas Kecamatan di Indonesia.

H. Teori Batas Wilayah Negara dan Wilayah Perbatasan Negara

Batas adalah tanda pemisah antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, baik berupa tanda alamiah maupun buatan. Penetapan dan penegasan batas wilayah suatu negara dirasakan sangat penting dan mendesak, hal tersebut didasarkan fakta semakin semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang memerlukan ruang baru kegiatan tersebut. Kebutuhan akan ruang ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hilang atau berubah batas wilayah suatu negara. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin akan muncul sengketa dan saling klaim wilayah satu satu Negara oleh Negara Lain.(Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009:35).

Wilayah merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu negara. Hal tersebut tampak dalam salah satu program kerja kabinet, yaitu mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya akan dapat terjaga apabila dijamin oleh kondisi stabilitas nasional dan kesejahteraan bangsa. Kondisi keamanan yang stabil pada gilirannya akan memperkuat kedaulatan dan integritas wilayah negara Indonesia. Berkaitan dengan hal

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kedaulatan, Keutuhan maupun integritas suatu negara secara internal dapat diwujudkan kedalam bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintah, sedangkan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subyek hukum internasional. Kedaulatan suatu negara secara eksplisit maupun implisit tampak dari eksistensi batas-batas wilayahnya. Tanpa adanya batas-batas wilayah, suatu negara akan sulit diakui keberadaannya didunia internasional sekaligus eksistensinya sebagai subyek hukum internasional. (Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Suryo Sakti Hadiwijoyo.2009:35)

I. Konsep Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara

Batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan yang dilaksanakan serasi dengan pendekatan lainnya, yaitu pada bidang keamanan. Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Oleh karena itu wilayah perbatasan memiliki peranan vital bagi tegaknya kedaulatan suatu negara. Usaha mengamankan dan melindungi berarti mewujudkan kondisi keamanan nasional yang terkendali. Dengan demikian pendekatan keamanan melihat kawasan perbatasan memiliki peranan penting bagi tetap stabilnya keutuhan wilayah suatu negara secara keseluruhan. Baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah malaysia telah menerapkan konsep pengelolaan wilayah perbatasan antar negara dalam kebijakan wilayah perbatasan dikalimantan. Hanya saja terjadi perbedaan dalam melaksanakan kebijakan tersebut di lapangan. Pemerintah malaysia berhasil menjalankan pengelolaan wilayah perbatasan dengan lebih berhasil dan merata serta berlangsung dengan efektif sedangkan disisi lain, Pemerintah Indonesia masih belum berhasil menjalankan pengelolaan wilayah secara efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif yang berhubungan dengan “Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Malaysia Diperbatasan (Studi Kasus Didesa Labang Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara)”.

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Labang, Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Peneliti mengadakan aktivitas studi pendahuluan pada tanggal 15-Juli-2015 sampai selesai.

Subjek penelitian dalam tulisan ini, adalah Masyarakat Desa Labang, Kepala Desa Labang, Ketua Adat Desa Labang dan Pemuda Penjaga Perbatasan.

Obyek penelitian dalam tulisan ini adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Diperbatasan Indonesia, Malaysia Labang Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Agar mendapatkan data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah: Data Primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data-data sekunder kemudian menarik kesimpulan. Analisis yang dilakukan disesuaikan dengan logika yaitu melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Negara Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan perlu di jaga keutuhan nya agar tidak di klaim oleh negara lain, termasuk daerah yang berada di daerah terpencil dan pedalaman yang lingkup wilayah perbatasan antar negara. Peran dan partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menjaga eksistensii keutuhan NKRI, agar memudahkan peran pemerintah untuk menjaga negara kesatuan, salah satunya di Provinsi Kalimantan Utara,

Kabupaten Nunukan, Kecamatan Lumbis Ogong, di Desa Labang, adalah bagian dari perbatasan langsung antar negara.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan di atas, maka peneliti akan menjelaskan partisipasi masyarakat Desa Labang sangat antusias dan penuh rasa nasionalisme dengan upaya melakukan pengecekan patok batas di perbatasan dengan kerja pihak Pamantas agar patok tidak begeser atau di geserkan oleh negara tetangga / Malaysia, adapun jadwal yang mereka lakukan dengan dua kali dalam seminggu untuk pergi ke perbatasan dan memastikan patok-patok Negara Republik Indonesia yang sudah ada.

Partisipasi dari masyarakat sangat luar biasa, melihat dari keterlibatan masyarakat yang berada di sekitar daerah perbatasan, dari masyarakat tidak hanya berharap dari pamantas dan peran negara, namun dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI melibatkan diri tanpa menunggu intruksi dari negara, masyarakat memiliki inisiatif untuk mengecek patok-patok yang di tentukan oleh negara Indonesia. Artinya rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan sangat tinggi untuk mencintai negeri NKRI, walaupun selama ini belum dilakukan meliputan oleh media massa.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI di daerah perbatasan sangat luar biasa, karena dengan suatu kesadaran masyarakat sebagai warga negara ikut turut serta dalam menjaga keutuhan NKRI salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat termasuk Tokoh lembaga adat adalah membuat aturan secara adat untuk mengawasi supaya kondisi dan situasi daerah perbatasan tetap aman dari tindak kriminal dari negara lain. Termasuk mencegah masuknya obat-obat terlarang seperti narkoba dan minuman keras yang bersifat merusak moral warga negara Indonesia, terutama di kalangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Dan selain itu pihak Pemerintah Desa untuk mengajak bersama masyarakat untuk pemasangan Tugu Garuda Pancasila bersama dengan Pemuda Penjaga Perbatasan dengan tujuan untuk memperkuat batas- batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di daerah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong. Hal ini yang dilakukan oleh masyarakat yang berada

di sekitar perbatasan terutama di Desa Labang bahwa partisipasi masyarakat sangat baik.

Kontribusi dan partisipasi masyarakat di daerah perbatasan sangat kreatif demi terwujudnya keutuhan NKRI di daerah perbatasan antar negara, salah satu tindakan nyata yang mereka lakukan adalah mendirikan suatu organisasi kemasyarakatan yang bernama Pemuda Penjaga Perbatasan sebagai salah sarana dan media yang mereka gunakan untuk menghimpun kekuatan dalam menjaga keutuhan NKRI agar tidak di ganggu oleh negara tetangga, selain itu juga pemuda penjaga perbatasan memiliki program kerja yaitu membantu masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Keluarga (KK) surat Nikah dan aksi sosial pengobatan gratis terhadap masyarakat yang berada di perbatasan Indonesia- Malaysia, karena dengan tujuan dari program tersebut untuk membantu dan memudahkan kepada masyarakat yang merasa kesulitan untuk mengurus KTP, KK dan surat Nikah, hal ini diakibatkan oleh kondisi geografis wilayah perbatasan sangat jauh dari Pemerintah Kabupaten Nunukan, dengan jarak tempuh satu hari dan mengeluarkan ongkos / biaya yang berjutaan, sehingga masyarakat sangat kesulitan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan pendapatan ekonomi menengah ke bawah, sehingga hal ini sangat sulit bagi masyarakat di perbatasan.

Keberadaan organisasi pemuda penjaga perbatasan sangat berdampak positif bagi negara, karena upaya yang mereka lakukan adalah bentuk- bentuk partisipasi untuk menjaga eksistensi keutuhan NKRI di perbatasan, hal demikian sangat di apresiasi langkah- langkah yang dilaksanakan oleh masyarakat demi mewujudkan keutuhan NKRI, selain itu pemuda penjaga perbatasan memfasilitasi dan mendatangkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dengan tujuan untuk menyaksikan dan memperlihatkan kondisi dan situasi masyarakat di wilayah perbatasan serta memperlihatkan rasa nasionalisme dan kesadaran masyarakat terhadap NKRI terutama masyarakat di desa- desa terpencil bahwa kepedulian masyarakat sangat antusias dalam menjaga keutuhan NKRI di wilayah perbatasan agar tidak di ganggu oleh negara lain.

Permasalahan Masyarakat Dalam Menjaga Daerah Perbatasan Wilayah Perbatasan:

- a. Belum adanya pos-pos jaga milik masyarakat untuk menjaga daerah perbatasan.
- b. terbatasnya sarana dan prasarana keamanan, di pos-pos pelintas batas.
- c. terbatasnya prasarana wilayah yang menghubungkan pusat-pusat perkotaan dengan pintu-pintu perbatasan.
- d. Belum adanya telkom untuk komunikasi dengan jarak jauh sehingga sulit untuk di jangkau.
- e. Letak Geografis yang sulit di jangkau, belum mampu untuk mendeteksi barang-barang Illegal dari Negara Tetangga.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keterlibatan Masyarakat Desa Labang untuk menjaga wilayah perbatasan relative baik, walaupun sebagian masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk melibatkan diri untuk berpartisipasi dalam menjaga daerah perbatasan, tetapi perlu ada informasi yang bersifat komprehensif agar semua masyarakat terlibat penuh dalam setiap kegiatan untuk menjaga Keutuhan NKRI.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Labang untuk menggerakkan peran serta masyarakatnya ialah dengan berkordinasi dengan pamtas penjaga perbatasan di Labang, yaitu mengajak masyarakatnya ikut serta dalam survei batas.

Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Labang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Labang untuk menjaga keamanan dan Keutuhan KRI memandatkan beberapa masyarakat untuk mengikuti kegiatan dari pemuda penjaga perbatasan dan pamtas yang bertugas dilabang agar mereka tergerak untuk ikut serta dalam menjaga daerah perbatasan.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian tentang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di perbatasan Indonesia,

Malaysia di Desa Labang Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dapat berimplikasi bahwa dengan adanya organisasi pemuda penjaga perbatasan dan masyarakat di Desa Labang untuk terlibat langsung untuk menjaga daerah perbatasan agar tetap kokoh dan utuh jangan sampai di ganggu oleh Negara lain. Peran Dari pemuda penjaga perbatasan dan masyarakat di Desa Labang memberikan dampak yang positif untuk menjaga dan mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

C. Saran

1. Masyarakat Labang

Untuk meningkatkan kesadaran dan mempertahankan wilayah NKRI di wilayah perbatasan khususnya Masyarakat Labang, maka Pemerintah Desa Labang dan Pemuda Penjaga Perbatasan dan Pantas Penjaga Perbatasan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat yang ada di Lumbis Ogong, khususnya masyarakat Labang yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia untuk berpartisipasi seperti mengajak sosialisasi, seminar, mengibarkan bendera merah putih, pemasangan Tugu Pancasila, survei batas, atau program yang lebih kongkrit.

2. Pemerintah Desa Labang dan Pemuda Penjaga Perbatasan

Perlu adanya Program-program lain yang kongkrit yang dapat merangsang ke seluruh masyarakat, Pemuda untuk terlibat dalam menjaga wilayah perbatasan tanpa terkecuali.

Perlu digerakkan jiwa Nasionalisme hubungan intensif antara masyarakat kecamatan Lumbis Ogong yang tergabung dalam 49 Desa diperbatasan Kecamatan Lumbis Ogong untuk menyatukan persepsi untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan, aman, sejahtera dan terhindar dari ancaman baik dari luar maupun dalam.

Perlu adanya kesadaran masyarakat secara umum, bukan hanya masyarakat Desa Labang yang ikut dalam menjaga Keutuhan NKRI di daerah perbatasan, melainkan sinergi semua stakeholder untuk berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta:UGM Press.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan*.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori umum tentang hukum negara*. Bandung: Nusamedia.
- Husnadi.(2006). *Menuju Model Pengembangan Wilayah Perbatasan antar Negara. Semarang:Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota, Universitas Diponegoro*.
- Isbandi, Adi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- uncoro. Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. ErlanggaJakarta
- Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Miles. Mathew. B. 1992.*Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Sudarman, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Supranto, J., 2000, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia Dimensi, Permasalahan, dan Strategis Penanganan (SebuahTinjauan Empiris dan Yuridis)*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

BIODATA PENULIS

NAMA : ANDRA
NPM : 11144300054
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : UBOL ALUNG, 21-01-1989
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : UBOL ALUNG KEC. LUMBIS OGONG
KAB. NUNUKAN, KALIMANTAN
UTARA
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
NAMA ORANG TUA
AYAH : LANAU
IBU : LIWATO

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NEGERI 014 UBOL SULOK
SMP : SMP NEGERI 1 NUNUKAN
SMA : SMA NEGERI 1 NUNUKAN
SARJANA : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA